

ABSTRAK

Judul Penelitian Skripsi Ini adalah Analisis Hukum tentang Pelaku Permufakatan Jahat dalam Kasus Narkotika Perspektif/ Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/Pn Snt). Dalam pasal 88 kitab undang-undang hukum pidana menjelaskan bahwa yang dikatakan permufakatan jahat ialah jika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan kejahatan. Pada pengaturan tindak pidana khusus di Indonesia, tindak pidana permufakatan jahat juga terjadi pada tindak pidana narkoba seperti yang saya bahas pada skripsi ini. Istilah narkoba merupakan suatu obat sintetik dan semisintetik yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, halusinasi atau agitasi. Dan berdasarkan pembahasan tersebut, pokok masalah dalam skripsi ini :1) Bagaimana putusan Hakim tentang pelaku permufakatan jahat dalam kasus narkoba dalam perspektif UU Nomor 35 tahun 2009 dan Hukum Islam(studi Putusan No. 98/Pid.Sus/2020/PN.Snt)? 2) Bagaimana persamaan dan perbedaan putusan hakim tentang pelaku permufakatan jahat dalam kasus narkoba dalam perspektif UU Nomor 35 Tahun 2009 dan Hukum Islam (Studi Putusan No. 98/Pid.Sus/2020/PN.Snt)?

Jenis penelitian yang digunakan pada riset permasalahan ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan mengkaji dan menelaah bahan pustaka sebagai data utama, yang menggunakan berbagai dokumen tertulis bisa dari internet, buku, surat kabar dan dokumen tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan yang akan penulis kaji. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu sumber data yang langsung diperoleh datanya untuk kemudian disajikan didalam penelitian ini sedangkan bahan hukum primer yaitu Sumber informasi ini merupakan referensi tidak langsung yang tersedia dari buku-buku yang

merujuk pada pembahasan dalam penelitian, yang digunakan sebagai pelengkap.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya untuk pelaku permufakatan jahat dalam kasus narkoba bahwa Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan dalam pasal 132 ayat 1. Dalam pandangan Hukum Islam bahwasanya untuk pengedar narkoba bisa dikategorikan kedalam hirabah dimana untuk ketetapan sanksi hukumannya adalah hadd yaitu dibunuh, disalip, atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang dan diasingkan.

Kata Kunci : Permufakatan jahat, Sanksi, Narkotika